

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang berperan penting dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan penopang perekonomian nasional (Yonariza, 2024). Namun, seiring dengan meningkatnya urbanisasi yang ditandai dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, pemukiman, dan infrastruktur perkotaan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kapasitas produksi pangan perkotaan serta semakin meningkatnya berbagai permasalahan lingkungan, salah satunya pengelolaan sampah rumah tangga (FAO, 2019). Permasalahan pertumbuhan penduduk, pemenuhan kebutuhan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan merupakan isu yang saling berkaitan dalam pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian tidak hanya berfungsi dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam upaya pelestarian lingkungan, sehingga perlu untuk terus ditingkatkan (Widada et al., 2023 sebagaimana dikutip dalam Yonariza, 2024).

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami dampak yang signifikan dari urbanisasi. Pertumbuhan penduduk dan jumlah wisatawan yang terus meningkat menyebabkan produksi sampah kota ini tergolong tinggi mencapai sekitar 125,25 ton per hari, di mana sebagian besar adalah sampah organik yang berasal dari aktivitas rumah tangga (BPS, 2023). Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, karena kota ini belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memadai, sehingga sampah harus diangkut ke TPA Regional di kota lain. Kondisi ini juga diperparah karena belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah yang menyebabkan permasalahan lingkungan menjadi semakin kompleks (WALHI Sumatera Barat, 2023).

Permasalahan lingkungan ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana, tetapi juga dengan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menegaskan bahwa keberhasilan suatu program

pemberdayaan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan program. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam upaya penyelesaian persoalan lingkungan perkotaan yang bersifat kompleks dan berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat hadir sebagai salah satu organisasi yang aktif mengadvokasi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai organisasi lingkungan yang memiliki jaringan luas di Indonesia, WALHI berupaya memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan sampah dan ketahanan pangan melalui pendekatan pertanian perkotaan atau *urban farming* (WALHI Sumatera Barat, 2023). *Urban farming* merupakan praktik bercocok tanam di lingkungan perkotaan dengan memanfaatkan lahan sempit atau ruang yang terbatas, menggunakan teknologi dan metode ramah lingkungan (FAO, 2019). *Urban Farming* tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemanfaatan lahan terbatas di wilayah perkotaan, tetapi juga berpotensi menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan (Mougeot, 2010). Melalui *urban farming*, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengolah sumber daya lokal, khususnya sampah organik, menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Kegiatan ini difokuskan pada program pemberdayaan di Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kota Bukittinggi. Program *urban farming* di wilayah ini diinisiasi dan didampingi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, serta diimplementasikan di tingkat lapangan melalui Kelompok Rumah dan Maggot Sejati sebagai wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Program *urban farming* yang dijalankan di kawasan ini melibatkan pengolahan sampah organik rumah tangga sebagai bahan baku kegiatan produksi, seperti budidaya maggot (larva *black soldier fly*) dan pengelolaan kompos. Program ini tidak hanya bertujuan pada pengurangan volume sampah, tetapi juga pada pembentukan kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan kegiatan. Dengan demikian, program *urban farming* yang dijalankan tidak sekadar berorientasi pada aspek



lingkungan, tetapi juga mengandung unsur pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas, peningkatan keterampilan, dan pembentukan kemandirian kelompok (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007).

Selain itu, masyarakat juga diedukasi mengenai pentingnya memilah sampah dan praktik 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Edukasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, WALHI juga melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi internasional seperti *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, dan komunitas lokal untuk memperkuat program pemberdayaan. Dengan adanya kolaborasi multi-pihak, WALHI tidak hanya mendukung pengembangan kapasitas masyarakat tetapi juga memastikan keberlanjutan program melalui dukungan kebijakan dan sumber daya (WALHI Sumatera Barat, 2023).

Implementasi program *urban farming* melibatkan beberapa strategi pemberdayaan, seperti pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan budidaya maggot dan pembuatan kompos, serta penguatan kapasitas kelompok dalam manajemen usaha dan pemasaran. Masyarakat juga difasilitasi akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan. Misalnya, dalam budidaya maggot, sampah organik yang terkumpul diolah menjadi pakan maggot yang dapat dijual sebagai sumber pakan ternak alternatif yang kaya protein. Sementara itu, kompos yang dihasilkan digunakan untuk menyuburkan tanaman di kebun-kebun *urban farming* (WALHI Sumatera Barat, 2023).

Dalam penelitian Hardika (2024) mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan program *urban farming*, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat, pendampingan yang berkelanjutan, serta kemampuan kelompok dalam mengelola sumber daya lokal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa *urban farming* tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan apabila diimplementasikan secara partisipatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi program *urban farming* dalam pemberdayaan masyarakat di

Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kota Bukittinggi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pemberdayaan masyarakat melalui program *urban farming* tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah sampah rumah tangga yang belum dikelola secara optimal. Sampah organik menjadi penyumbang terbesar, namun masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelolanya menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan dan potensi gangguan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan perilaku dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan saat *pra survei*, kondisi serupa juga terjadi di Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kota Bukittinggi. Penumpukan sampah organik di lingkungan pemukiman menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan mendorong dilaksanakannya program *urban farming* sebagai salah satu solusi alternatif. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produktif yang berkelanjutan. (WALHI Sumatera Barat, 2023)

Pelaksanaan program *urban farming* di Kelurahan Bukit Apit Puhun melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai tahapan kegiatan. Namun, dalam praktiknya, implementasi program tidak terlepas dari berbagai dinamika, seperti perbedaan tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta dukungan kelembagaan yang masih perlu diperkuat.

Diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Penanggung Jawab Lapangan, serta Ketua Operator Kelompok Rumah Kompos dan Maggot Sejati, diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih belum merata. Sebagian masyarakat menganggap kegiatan memilah sampah terlalu merepotkan, sementara beberapa tempat pembuangan sampah (TPS) di wilayah tersebut tidak lagi beroperasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana

implementasi program *urban farming* dilaksanakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Selain itu, perlu pula diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program supaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui *urban farming* dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut merupakan rumusan masalah penelitian yang dikaji dalam rencana penelitian kali ini:

1. Bagaimana implementasi program pertanian perkotaan (*urban farming*) melalui tahapan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program pertanian perkotaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi program pertanian perkotaan (*urban farming*) melalui tahapan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program pertanian perkotaan (*urban farming*) dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam kajian pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait implementasi program *urban farming*, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pengelola program dalam memahami implementasi



program *urban farming* serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhinya sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program ke depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program *urban farming* sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

